

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengenal Corporate Governance ketika krisis ekonomi di kawasan Asia menimpa Indonesia sekitar tahun 1997-1998. Dampak krisis ekonomi tersebut melemahkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Krisis tahun 1998 merupakan krisis ekonomi terburuk yang di Indonesia, sehingga terjadi inflasi pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami peningkatan inflasi sebesar 11,10% dan mengalami kenaikan sebesar 77,60% pada tahun 1998. Kenaikan inflasi tahun 1998 merupakan kenaikan inflasi tertinggi di Indonesia hingga sekarang, di ikut kedua pada tahun 2005 dan di ikuti ketiga pada tahun 2008.

Tabel 1. Tingkat Inflasi (dalam%)

Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi
1996	6,50	2008	11,06
1997	11,10	2009	2,78
1998	77,60	2010	6,96
1999	2,00	2011	3,79
2000	9,40	2012	4,36
2001	12,55	2013	5,47
2002	10,03	2014	8,36
2003	5,16	2015	5,85
2004	6,40	2016	3,53
2005	17,11	2017	3,81
2006	6,60	2018	3,20
2007	6,59		

Sumber: Data diolah, 2019 (www.bi.go.id)

Penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia karena lemahnya Corporate Governance dan etika yang melandasinya (Hamdani, 2016:1). Dengan adanya Corporate Governance dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi.

Tabel 2: Skor Peringkat Corporate Governance di Asia tahun 2000

No.	Negara	Skor
1.	Singapura	2,00
2.	Hongkong	3,59
3.	Jepang	4,00
4.	Filipina	5,00
5.	Taiwan	6,10
6.	Malaysia	6,20

7.	Thailand	6,67
8.	China	8,22
9.	Indonesia	8,29
10.	Korea Selatan	8,83
11.	Vietnam	8,89

Sumber: PERC dalam, Helena Saver

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PERC, Indonesia ada di posisi tiga terbawah dari 11 negara Asia yang menerapkan Corporate Governance. Menurut PERC yang dikutip dalam Helena (2018:144), semakin tinggi skor, maka akan semakin buruk Corporate Governance-nya.

Menurut (Wardhani, 2007) Dewan Direksi merupakan suatu mekanisme corporate governance yang bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para pihak institusional. Tingginya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting mereka yang akan mempengaruhi kebijakan manajemen (Schleifer dan Vishny, 1986 dalam Wardhani, 2007). Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional yang tinggi ini maka pemegang saham institusional ini dapat mengantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi yang sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya seperti modal dan tenaga kerja. Kemajuan pelaksanaan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur penunjangnya, terutama infrastruktur transportasi, peran transportasi lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (www.bappenas.go.id, 2019). Sektor transportasi masih memiliki peluang investasi yang besar dengan permintaan akan transportasi darat, udara dan laut, di samping itu pasar domestik masih memiliki peluang yang cukup kuat. Pertumbuhan sarana transportasi semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat. Dengan banyaknya pertumbuhan tersebut semakin berkembanglah perusahaan transportasi di Indonesia. Namun perkembangan tersebut dihambat oleh masalah-masalah yang timbul pada sektor transportasi di Indonesia seperti meningkatnya harga bahan bakar, kelangkaan bahan bakar dan kecelakaan transportasi yang dapat membuat kerugian.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan transportasi adalah:

1. Laporan keuangan yang dilaporkan di bursa efek Indonesia banyak yang tidak wajar atau jujur.
2. Komite Audit tidak independen dalam melakukan pemeriksaan.
3. Komisaris banyak yang tidak aktif atau hanya nom pang nama saja.
4. Komisaris tidak melakukan kegiatan pengawasannya dengan baik.
5. Kepemilikan saham tidak jelas pemisahan sahamnya.

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Beberapa perusahaan transportasi didapati menerbitkan laporan keuangan dengan integritas yang rendah karena tidak mencerminkan realitas sesungguhnya.
2. Fungsi pengawasan yang dilakukan kurang optimal.
3. Beberapa perusahaan transportasi didapati memanipulasi data akuntansi.
4. Beberapa perusahaan transportasi didapati memiliki manajemen yang berperan ganda.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Dwidinda (2017) Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) (dalam Barnae dan Rubin, 2005) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar, dkk (1999) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

Mekanisme *corporate governance* membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendeklegasian wewenang kepada pihak manajemen.

- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktek transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

Menurut Brigham (2005:528) Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan investasi saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti: perusahaan, dana pensiun, reksadana dll dalam jumlah yang besar. Institusi adalah pengambil keputusan profesional yang mengetahui bagaimana mengukur kinerja perusahaan dan cara untuk mengawasi pihak manajemen.

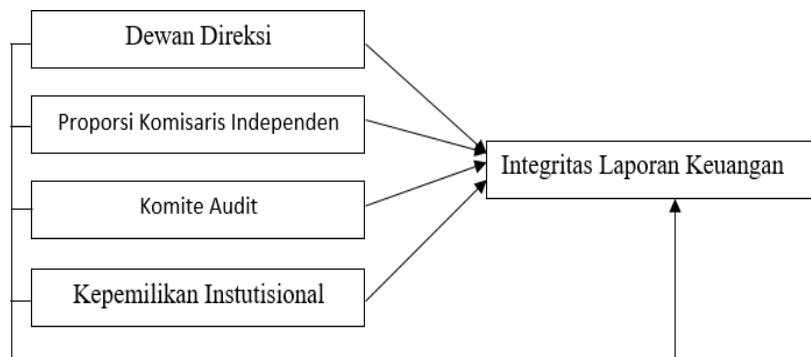
Kompetensi komite audit menjadi salah satu karakteristik yang penting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan tugas mereka secara efektif. Komite audit yang memiliki anggota dengan kompetensi akuntansi atau keuangan akan memiliki standar yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan akan selalu berusaha untuk menghasilkan kinerja dan image yang baik bagi perusahaan (Rahmat et al., 2009).

FCGI (2002) berpendapat bahwa komite audit minimal harus memiliki satu orang anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang akuntansi. Anggota komite audit yang menguasai akuntansi akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat et al., 2009).

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan institusional adalah: “Merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Semakin banyak anggota komite audit yang berkompetensi dibidang akuntansi atau keuangan maka akan semakin

efektif dalam memitigasi perusahaan dari integritas laporan keuangan. Sedikitnya jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi dibidangakuntansi atau keuangan akan membuat perusahaan mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan perusahaan tidak memiliki integritas laporan keuangan.

Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas laporan keuangan satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima unum (SPAP, 1994, alinea 1).



Gambar: Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H1 : Apakah Dewan Direksi berpengaruh secara parsial terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017?
- H2 : Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017
- H3 : Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017
- H4 : Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017
- H5 : Apakah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013- 2017.